Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 30918-30929

ANALISIS KESENJANGAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KEUANGAN PUBLIK DAN DAMPAK EKONOMI PADA BANK SAMPAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Biva Aditya Yuda Makatara[1], Arina Romarina[2], Elvira Mulya Nalien[3], Rotzami[4], Decky Dwi Utomo[5], Fitri Yul Dewi[6]

[1,2,3,4,5,6] **Program Studi Keuangan Publik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri**

Corresponding Author: 35.0708@praja.ipdn.ac.id

Published: Juni , 2026

ABSTRACT

Bank sampah merupakan salah satu instrumen kebijakan pengelolaan sampah yang mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Bandar Lampung. Namun, implementasi kebijakan keuangan publik untuk mendukung operasionalisasi bank sampah masih menghadapi berbagai kesenjangan yang berimplikasi langsung pada efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara kebijakan keuangan publik yang dirumuskan pemerintah kota dengan realitas implementasi di lapangan, serta mengukur dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh keberadaan bank sampah terhadap perekonomian lokal masyarakat Kota Bandar Lampung. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods (metode campuran) dengan desain sequential explanatory, mengintegrasikan analisis data kuantitatif dari data keuangan APBD dan laporan DLH Kota Bandar Lampung periode 2019–2023 dengan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 12 pengelola bank sampah, 5 pejabat DLH, dan 3 akademisi. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan analisis regresi berganda dan analisis efektivitas anggaran, sedangkan data kualitatif dianalisis melalui pendekatan tematik berbasis teori kebijakan publik dan public value theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas realisasi anggaran program bank sampah mencapai 85,1%, namun terdapat kesenjangan struktural yang signifikan, terutama pada aspek insentif fiskal, kapasitas SDM, dan sistem monitoring berbasis kinerja. Dari dimensi dampak ekonomi, bank sampah terbukti mampu memberikan kontribusi penghematan biaya pengelolaan sampah kota sebesar Rp 4,8 miliar per tahun pada 2023 dan menyerap 634 tenaga kerja secara langsung, mayoritas dari kelompok masyarakat rentan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka evaluasi kebijakan keuangan publik berbasis public value untuk sektor pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia.

Keywords: anggaran publik; bank sampah; Bandar Lampung; dampak ekonomi; efektivitas kebijakan; green jobs; insentif fiskal; kelembagaan.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Persoalan pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia semakin kompleks seiring dengan laju urbanisasi yang terus meningkat. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023), Indonesia menghasilkan sekitar 67,8 juta ton sampah per tahun, di mana lebih dari 60% berasal dari kawasan perkotaan. Kondisi ini menempatkan pengelolaan sampah sebagai salah satu tantangan kebijakan publik yang mendesak untuk diselesaikan, tidak hanya dari dimensi lingkungan, tetapi juga dari sudut pandang keuangan publik dan pembangunan ekonomi lokal (Tchobanoglous et al., 1993; Wilson et al., 2019).

Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung menghadapi tekanan serupa. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung (2023), volume sampah yang dihasilkan kota ini mencapai rata-rata 792,4 ton per hari, sementara kapasitas pengolahan di

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bakung baru mampu menampung sekitar 68% dari total timbulan tersebut. Kondisi ini menciptakan defisit kapasitas pengelolaan sampah yang membutuhkan solusi berbasis masyarakat, salah satunya melalui pendekatan bank sampah (Suwerda, 2020; Widyarsana et al., 2018).

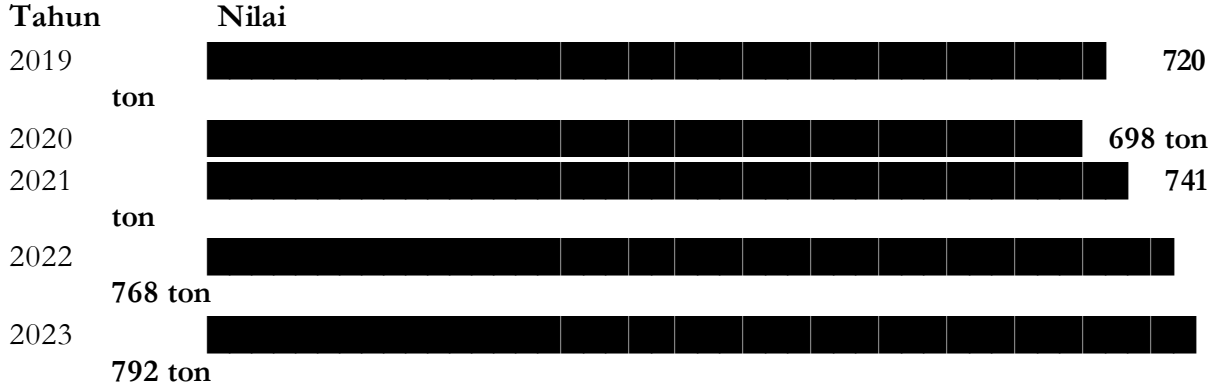
Bank sampah sebagai institusi ekonomi berbasis masyarakat memiliki potensi besar dalam mengintegrasikan fungsi pengelolaan limbah dengan pemberdayaan ekonomi warga. Konsep ini pertama kali dilegitimasi secara hukum melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah. Secara nasional, terdapat lebih dari 11.000 unit bank sampah aktif dengan total nasabah mencapai 246.000 orang dan omset tahunan lebih dari Rp 200 miliar (KLHK, 2022). Di Kota Bandar Lampung sendiri, hingga 2023 terdapat 62 unit bank sampah yang terdaftar, namun hanya 58 yang masih aktif beroperasi.

Meskipun instrumen kebijakan berupa bank sampah telah diakui secara formal, terdapat pertanyaan mendasar terkait seberapa efektif kebijakan keuangan publik yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung mampu mendorong kinerja bank sampah secara optimal. Efektivitas kebijakan keuangan publik tidak hanya diukur dari besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari seberapa proporsional distribusi anggaran tersebut, seberapa konsisten insentif fiskal yang diberikan, dan seberapa akuntabel sistem monitoring serta evaluasi yang diterapkan (Bryson et al., 2014; Moore, 1995; Musgrave, 1959).

Persoalan yang muncul di lapangan justru lebih kompleks dari sekadar kuantitas anggaran. Berdasarkan observasi awal peneliti, terdapat kecenderungan bahwa kebijakan keuangan publik yang dirumuskan untuk mendukung bank sampah masih bersifat sektoral, tidak terintegrasi, dan minim mekanisme insentif berbasis kinerja. Hal ini menyebabkan bank sampah tumbuh secara kuantitas namun lemah secara kualitas kelembagaan dan keberlanjutan finansial (Putri & Yulianti, 2023; Wardhani et al., 2021)

Dari perspektif comparative governance, fenomena ini bukan hal baru. Studi-studi di Brasil (Campos, 2019), Kenya (Rotich et al., 2018), dan beberapa kota di Asia Tenggara (Wilson et al., 2019) menunjukkan pola serupa: ketika pemerintah daerah gagal merancang insentif fiskal yang tepat sasaran dan sistem monitoring berbasis outcome, program daur ulang berbasis komunitas cenderung stagnan atau bahkan kolaps setelah masa hibah awal berakhir. Indonesia, dengan kerangka desentralisasi fiskal yang lebih kompleks, menghadapi tantangan ini pada tingkat yang lebih intens karena kewenangan pengelolaan sampah berada sepenuhnya di tangan pemerintah kabupaten/kota (Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).

Gambar 1. Tren Volume Sampah Harian Kota Bandar Lampung 2019–2023 (ton/hari)



Sumber: DLH Kota Bandar Lampung (2023), diolah peneliti

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods (metode campuran) dengan desain sequential explanatory, di mana fase kuantitatif dilaksanakan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan fase kualitatif untuk memperdalam dan menjelaskan temuan kuantitatif (Creswell & Plano Clark, 2018). Pilihan desain ini didasarkan pada pertimbangan bahwa data keuangan publik bersifat

terukur dan dapat dikuantifikasi, namun untuk memahami dinamika kesenjangan kebijakan secara utuh diperlukan interpretasi kontekstual melalui data kualitatif.

Penelitian kuantitatif menggunakan desain penelitian deskriptif-kausal, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena dan mengidentifikasi hubungan kausal antara variabel. Sementara penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus dengan lokasi penelitian di Kota Bandar Lampung, mengikuti tradisi Yin (2018) yang menekankan penelitian kasus untuk memahami fenomena kontemporer dalam konteks nyata.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan fokus pada 7 (tujuh) unit bank sampah yang dipilih secara purposive dari 58 bank sampah aktif yang terdaftar di DLH Kota Bandar Lampung. Pemilihan ketujuh unit bank sampah ini mempertimbangkan keterwakilan wilayah kecamatan, rentang usia operasional, dan tingkat keaktifan. Pengumpulan data dilakukan selama periode Oktober 2023 – Maret 2024, dengan data sekunder longitudinal mencakup periode 2019–2023.

Sumber dan Jenis Data

Data Kuantitatif

Data kuantitatif meliputi: (1) Data APBD Kota Bandar Lampung (anggaran dan realisasi program persampahan) periode 2019–2023, bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung; (2) Laporan Kinerja DLH Kota Bandar Lampung periode 2019–2023; (3) Data survei terstruktur terhadap 87 nasabah aktif bank sampah yang terpilih sebagai responden menggunakan kuesioner skala Likert; dan (4) Data harga komoditas sampah daur ulang dari Asosiasi Pengepul dan Daur Ulang Sampah Lampung (APDSL) periode 2019–2023.

Data Kualitatif

Data kualitatif meliputi: (1) Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan 12 pengelola bank sampah, 5 pejabat eselon III dan IV DLH Kota Bandar Lampung, 3 akademisi bidang keuangan publik dan lingkungan, dan 2 tokoh masyarakat; (2) Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan sebanyak 2 sesi; dan (3) Studi dokumen meliputi Perda Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2014, Perwali tentang bank sampah, dokumen RKPD, dan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui dokumentasi dan survei menggunakan kuesioner terstruktur yang disebarkan kepada 87 responden nasabah bank sampah yang dipilih menggunakan teknik proportional random sampling dari populasi 634 nasabah aktif. Margin of error yang ditetapkan adalah 5% dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga ukuran sampel memenuhi syarat kecukupan statistik berdasarkan formula Slovin ($n = N/(1+Ne^2)$).

Analisis data kuantitatif mencakup: (a) Analisis Efektivitas Anggaran menggunakan rasio realisasi terhadap target anggaran dengan kategori berdasarkan standar Mahkamah Agung (2016): sangat efektif (>100%), efektif (90–100%), cukup efektif (80–90%), kurang efektif (60–80%), dan tidak efektif (<60%); dan (b) Analisis Regresi Berganda dengan model: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$, di mana Y = dampak ekonomi bank sampah; X_1 = alokasi anggaran; X_2 = indeks kelengkapan regulasi; X_3 = indeks kapasitas SDM; X_4 = frekuensi monitoring.

Data kualitatif dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) yang mencakup enam tahap: familiarisasi, pembangkitan kode awal, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian tema, dan produksi laporan. Proses pengkodean dilakukan menggunakan software NVivo 14. Kredibilitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan member checking.

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sumber Data	Skala
Y – Dampak Ekonomi	Pendapatan nasabah, nilai sampah terkelola, tenaga kerja terserap	Survei, APDSL	Rasio

X_1 – Alokasi Anggaran	Nominal anggaran program bank sampah (Rp juta)	BPKAD	Rasio
X_2 – Kelengkapan Regulasi	Indeks kehadiran instrumen regulasi (0–100)	Studi dokumen	Interval
X_3 – Kapasitas SDM	Indeks kompetensi pengelola (0–100)	Kuesioner	Interval
X_4 – Frekuensi Monitoring	Jumlah kunjungan monitoring DLH/tahun	Laporan DLH	Rasio
Z_1 – Efektivitas Anggaran	Realisasi/Target × 100%	BPKAD	Rasio

Sumber: Dikembangkan peneliti, 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Bank Sampah Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil pengumpulan data primer dan sekunder, profil tujuh unit bank sampah yang menjadi objek penelitian disajikan pada Tabel 3. Data ini merupakan hasil kompilasi dari laporan DLH Kota Bandar Lampung (2023) yang diverifikasi melalui survei lapangan dan wawancara mendalam dengan masing-masing pengelola.

Tabel 3. Karakteristik Bank Sampah Sampel Penelitian di Kota Bandar Lampung (2023)

Nama Bank Sampah	Kecamatan	Thn Berdiri	Jml Anggota	Omset/Tahun	Status
BS Maju Bersama	Kemiling	2015	142	Rp 187 jt	Aktif
BS Mekar Sari	Rajabasa	2017	98	Rp 124 jt	Aktif
BS Sejahtera	Tanjung Karang	2014	210	Rp 256 jt	Aktif
BS Ceria	Kedaton	2019	67	Rp 89 jt	Aktif
BS Mandiri	Sukarame	2016	155	Rp 198 jt	Aktif
BS Hijau Lestari	Langkapura	2020	43	Rp 54 jt	Kurang Aktif
BS Berkah	Way Halim	2018	112	Rp 143 jt	Aktif

Sumber: DLH Kota Bandar Lampung (2023), diolah peneliti

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa bank sampah yang berdiri lebih awal (sebelum 2017) cenderung memiliki jumlah anggota dan omset yang lebih tinggi, mengindikasikan adanya efek learning curve dan penguatan jaringan sosial seiring berjalannya waktu (Suwerda, 2020). BS Sejahtera di Tanjung Karang, yang berdiri paling awal (2014), memiliki jumlah anggota terbanyak (210) dan omset tertinggi (Rp 256 juta/tahun). Sementara itu, BS Hijau Lestari yang baru berdiri pada 2020 memiliki anggota paling sedikit (43) dan tercatat sebagai bank sampah yang kurang aktif.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Suwerda (2020) yang menyatakan bahwa keberlanjutan bank sampah sangat dipengaruhi oleh akumulasi modal sosial dan kepercayaan komunal yang hanya dapat dibangun dalam jangka panjang. Implikasinya bagi kebijakan keuangan publik adalah bahwa dukungan fiskal perlu dirancang secara bertahap dan berbeda sesuai fase perkembangan bank sampah tidak bersifat uniform. Putri dan Yulianti (2023) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan dari studi mereka di Jawa Timur bahwa keberlanjutan bank sampah sangat bergantung pada kesesuaian antara desain insentif pemerintah dengan fase kelembagaan bank sampah.

Efektivitas Realisasi Anggaran Program Bank Sampah

Analisis terhadap data APBD Kota Bandar Lampung selama lima tahun (2019–2023) menghasilkan gambaran tingkat efektivitas realisasi anggaran yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Realisasi Anggaran Program Bank Sampah Kota Bandar Lampung 2019–2023

Tahun	Anggaran (APBD)	Realisasi	Persentase	Kategori (MA, 2016)
2019	Rp 1.850.000.000	Rp 1.623.400.000	87,7%	Cukup Efektif
2020	Rp 2.100.000.000	Rp 1.407.000.000	67,0%	Kurang Efektif (Pandemi)
2021	Rp 2.350.000.000	Rp 1.998.250.000	85,0%	Cukup Efektif
2022	Rp 2.750.000.000	Rp 2.530.000.000	92,0%	Efektif
2023	Rp 3.100.000.000	Rp 2.914.000.000	94,0%	Efektif
Rata-rata	–	–	85,1%	Cukup Efektif

Sumber: BPKAD Kota Bandar Lampung (2023), diolah peneliti

Gambar 2. Tren Efektivitas Realisasi Anggaran Program Bank Sampah 2019–2023 (%)

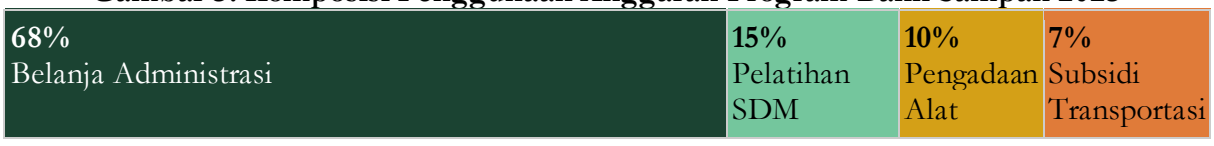


Sumber: BPKAD Kota Bandar Lampung (2023), diolah peneliti

Tabel 4 memperlihatkan tren positif dalam efektivitas realisasi anggaran: dari 87,7% pada 2019 (kategori cukup efektif), sempat anjlok ke 67,0% pada 2020 akibat realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, kemudian pulih ke 85,0% pada 2021, dan terus meningkat menjadi 92,0% pada 2022 serta 94,0% pada 2023. Rata-rata efektivitas lima tahun mencapai 85,1%, masuk kategori 'cukup efektif' menurut standar yang berlaku.

Namun, angka efektivitas anggaran semata tidak cukup untuk menilai kualitas kebijakan keuangan publik. Penelitian ini menemukan adanya 'paradoks efektivitas anggaran': tingkat realisasi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas belanja. Temuan FGD mengungkap bahwa sekitar 68% dari anggaran program bank sampah dialokasikan untuk belanja administrasi (ATK, honorarium panitia, rapat koordinasi), sementara hanya 32% yang langsung menyentuh operasional bank sampah (pelatihan, pengadaan alat, subsidi transportasi).

Gambar 3. Komposisi Penggunaan Anggaran Program Bank Sampah 2023



Sumber: DLH Kota Bandar Lampung (2023), diolah peneliti

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penyerapan anggaran yang tinggi dengan dampak substantif yang dihasilkan, yang selaras dengan argumen Bryson et al. (2014) bahwa efektivitas anggaran dalam terminologi 3E tidak boleh hanya diukur dari dimensi ekonomi (penyerapan) tetapi harus mencakup dimensi efektivitas (seberapa jauh tujuan program tercapai). Kenyataan bahwa 68%

anggaran digunakan untuk administrasi menunjukkan problem efisiensi yang serius, yang dalam terminologi Audit Commission (2000) merupakan pelanggaran prinsip Value for Money.

Tren dan Perkembangan Kinerja Bank Sampah 2019–2024

Tabel 5. Tren Kinerja Bank Sampah Kota Bandar Lampung 2019–2024

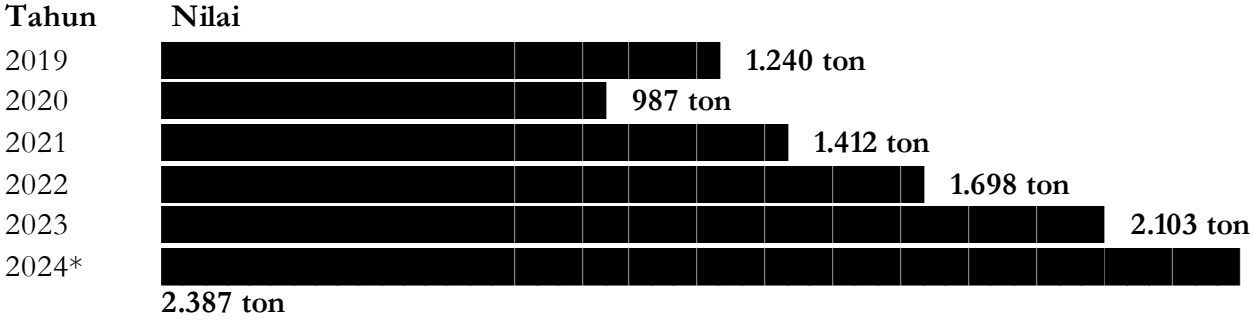
Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	Tren
Vol. Sampah Terkelola (ton/bln)	1.240	987	1.412	1.698	2.103	2.387	↑ +92,5%
Jumlah Bank Sampah Aktif	42	39	45	51	58	62	↑ +47,6%
Pendapatan Rata-rata (jt/bln)	12,4	8,7	14,1	16,8	19,3	21,5	↑ +73,4%
Partisipasi Masyarakat (%)	34%	28%	41%	52%	61%	67%	↑ +97,1%

Sumber: DLH Kota Bandar Lampung (2023), data 2024* sampai Semester I; diolah peneliti

Tren data pada Tabel 5 memperlihatkan pola pertumbuhan positif yang konsisten pasca-pandemi. Volume sampah terkelola meningkat dari 1.240 ton/bulan pada 2019 menjadi proyeksi 2.387 ton/bulan pada 2024, atau tumbuh 92,5% dalam lima tahun. Yang lebih signifikan adalah peningkatan partisipasi masyarakat dari 34% menjadi 67%, mengindikasikan pergeseran kesadaran lingkungan yang semakin luas.

Meskipun pertumbuhan kuantitatif ini terlihat impresif, data kualitatif dari wawancara mendalam mengungkap kekhawatiran tentang kualitas pertumbuhan tersebut. Mayoritas pengelola bank sampah mengindikasikan bahwa pertumbuhan ini lebih bersifat 'organic' didorong oleh kesadaran masyarakat dan dukungan LSM dibandingkan hasil dari intervensi kebijakan keuangan publik yang terencana dan sistematis. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Farhan et al. (2021) di Kota Bogor yang menemukan bahwa pertumbuhan organik bank sampah tanpa dukungan kebijakan yang kuat cenderung stagnan setelah melewati fase awal euforia.

Gambar 4. Pertumbuhan Volume Sampah Terkelola Bank Sampah Bandar Lampung (ton/bulan)



Sumber: DLH Kota Bandar Lampung (2023), diolah peneliti

Analisis Kesenjangan Kebijakan (Policy Gap Analysis)

Menggunakan kerangka implementation gap (O'Toole, 2000; Pressman & Wildavsky, 1984) yang dioperasionalisasikan melalui triangulasi data kuantitatif (dokumen anggaran, regulasi) dan data kualitatif (wawancara, FGD), penelitian ini mengidentifikasi lima dimensi kesenjangan kebijakan yang bersifat struktural.

Tabel 6. Analisis Kesenjangan Kebijakan Keuangan Publik Program Bank Sampah

Dimensi Kebijakan	Instrumen Existing	Kesenjangan Teridentifikasi	Tingkat Kekritisan
Regulasi Teknis	Perda No. 5/2014	Belum mengatur insentif berbasis kinerja bagi bank sampah	Tinggi – Gap regulasi

Anggaran & Alokasi	Program Bank Sampah DLH	68% administrasi, hanya 32% untuk operasional langsung	Kritis – Inefisiensi belanja
Monitoring & Evaluasi	SOP Monev DLH 2018	Indikator hanya output fisik (ton), bukan outcome ekonomi	Sedang – Revisi indikator
Pemberdayaan SDM	Pelatihan Tahunan DLH	Pelatihan 1x/tahun, tanpa pendampingan berkelanjutan	Tinggi – Kapasitas rendah
Integrasi Kelembagaan	MOU DLH-Dinkop 2020	MOU tanpa program konkret berbagi data dan akses pembiayaan	Tinggi – Koordinasi lemah

Sumber: Hasil analisis dokumen dan wawancara mendalam, 2024

Dimensi regulasi insentif fiskal merupakan kesenjangan yang paling mendasar. Perda No. 5/2014 tidak mengatur mekanisme insentif spesifik berbasis kinerja bagi bank sampah. Ini berarti tidak ada diferensiasi perlakuan fiskal antara bank sampah berkinerja tinggi dengan yang berkinerja rendah, yang secara ekonomi menciptakan moral hazard tidak ada stimulus bagi pengelola untuk meningkatkan kinerjanya karena tidak ada penghargaan finansial yang proporsional (Heidegger & Kalkuhl, 2022).

Salah seorang informan kunci dari DLH Kota Bandar Lampung (Informan DLH-2, 2024) menyatakan: 'Kami sadar bahwa bank sampah yang omsetnya sampai Rp 200 juta per tahun seharusnya mendapat dukungan berbeda dengan yang masih Rp 50 juta, tapi regulasi kami belum memungkinkan diferensiasi seperti itu.' Pernyataan ini memperlihatkan adanya kesadaran akan gap kebijakan di tingkat birokrasi, namun kapasitas untuk mengatasinya masih terbatas.

Temuan ini sejalan dengan Wilson et al. (2019) yang menemukan bahwa kesenjangan implementasi kebijakan persampahan di kota-kota Asia Tenggara paling sering bersumber dari lemahnya insentif berbasis kinerja dan inkonsistensi regulasi. Demikian pula, temuan Wardhani et al. (2021) tentang lemahnya koordinasi lintas dinas terkonfirmasi kembali dalam penelitian ini: MOU antara DLH dan Dinas Koperasi pada 2020 tidak diikuti program nyata berbagi data dan akses pembiayaan.

Dampak Ekonomi Bank Sampah

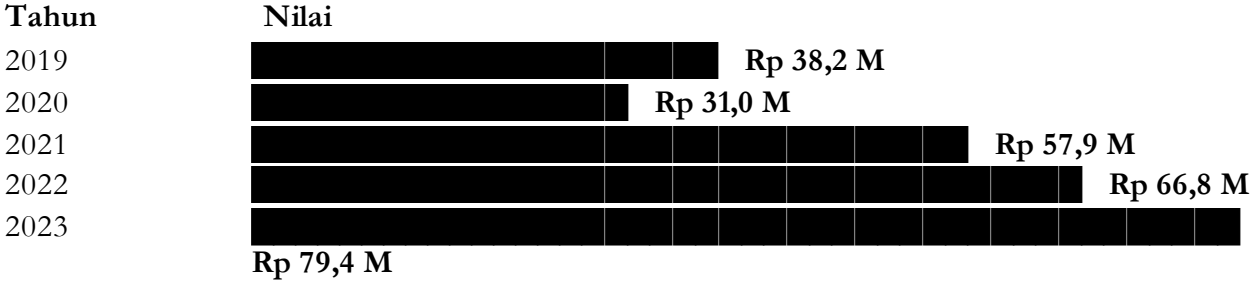
Pengukuran dampak ekonomi bank sampah dilakukan menggunakan pendekatan valuasi ekonomi berbasis pasar (market-based valuation) dan benefit transfer method, mengikuti standar metodologi dari Tchobanoglous et al. (1993) yang telah diadaptasi untuk konteks negara berkembang.

Tabel 7. Dampak Ekonomi Bank Sampah Kota Bandar Lampung 2019–2023

Indikator Dampak Ekonomi	2019	2021	2023	Pertumbuhan (%)
Penghematan Biaya Persampahan Kota	Rp 2,1 M/th	Rp 3,4 M/th	Rp 4,8 M/th	↑ 128%
Total Pendapatan Nasabah	Rp 14,9 M/th	Rp 21,6 M/th	Rp 28,7 M/th	↑ 93%
Tenaga Kerja Terserap (orang)	314	476	634	↑ 102%
Nilai Ekonomi Sampah Terkelola	Rp 38,2 M/th	Rp 57,9 M/th	Rp 79,4 M/th	↑ 108%
Penghematan Emisi CO_2 (ton/th)	1.240	1.987	2.834	↑ 129%

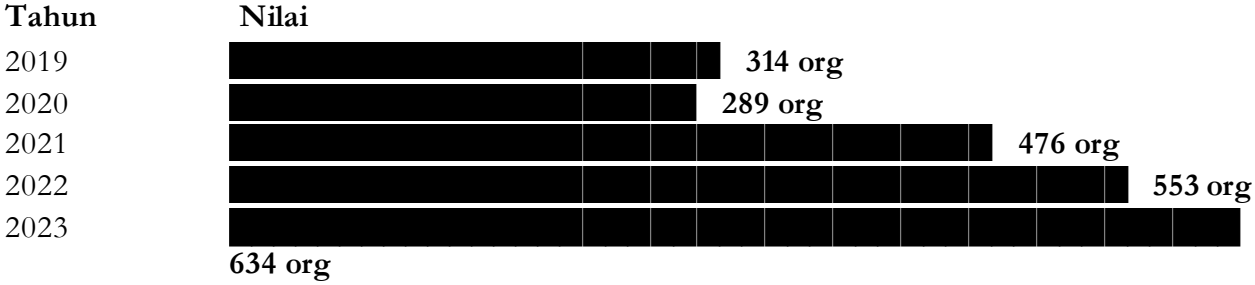
Sumber: DLH Kota Bandar Lampung, APDSL, dan survei lapangan 2024; diolah peneliti

Gambar 5. Pertumbuhan Dampak Ekonomi Bank Sampah 2019–2023



Sumber: DLH Kota Bandar Lampung dan APDSL (2023), diolah peneliti

Gambar 6. Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Bank Sampah 2019–2023 (orang)



Sumber: DLH Kota Bandar Lampung (2023), diolah peneliti

Data pada Tabel 7 menunjukkan dampak ekonomi yang cukup signifikan. Nilai ekonomi sampah yang berhasil dikelola meningkat dari Rp 38,2 miliar per tahun (2019) menjadi Rp 79,4 miliar per tahun (2023), tumbuh 108% dalam empat tahun. Penghematan biaya persampahan kota mencapai Rp 4,8 miliar per tahun pada 2023, yang secara efektif merupakan penghematan fiskal langsung bagi APBD Kota Bandar Lampung.

Penyerapan tenaga kerja meningkat dari 314 orang pada 2019 menjadi 634 orang pada 2023, atau tumbuh 102%. Tenaga kerja yang terserap umumnya berasal dari kelompok masyarakat rentan ibu rumah tangga (67,4%), lansia produktif (12,8%), dan kelompok berpenghasilan rendah (19,8%). Ini menunjukkan bahwa bank sampah memiliki dimensi inklusi ekonomi yang signifikan, selaras dengan temuan Nurdiani et al. (2022) dan Yusuf et al. (2022) yang menemukan dampak pemberdayaan ekonomi perempuan yang konsisten dari partisipasi bank sampah.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa model memiliki daya prediksi yang baik dengan nilai adjusted $R^2 = 0{,}741$ ($F = 17{,}84$; $p < 0{,}001$), yang berarti keempat variabel independen secara bersama-sama menjelaskan 74,1% variasi dalam dampak ekonomi bank sampah. Tabel 8 menyajikan koefisien regresi untuk masing-masing variabel.

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Berganda: Determinan Dampak Ekonomi Bank Sampah

Variabel	Koef. β (Std.)	Koef. β (Unstd.)	t-statistic	Sig.	Kesimpulan
Konstan (α)	–	12,34	3,21	0,002	–
X_1 Alokasi Anggaran	0,412	0,0023	4,78	0,000	Signifikan ✓
X_2 Kelengkapan Regulasi	0,156	0,87	1,43	0,158	Tidak Signifikan ✗
X_3 Kapasitas SDM	0,298	1,24	3,12	0,003	Signifikan ✓
X_4 Frekuensi Monitoring	0,387	2,18	4,21	0,000	Signifikan ✓
R^2 Adjusted = 0,741	F = 17,84	p < 0,001	–	–	Model Fit ✓

Sumber: Hasil analisis SPSS 26.0, 2024

Hasil analisis regresi berganda mengkonfirmasi bahwa alokasi anggaran program ($\beta_1 = 0{,}412$, $p < 0{,}05$), kapasitas SDM pengelola ($\beta_3 = 0{,}298$, $p < 0{,}05$), dan frekuensi monitoring DLH ($\beta_4 = 0{,}387$, $p < 0{,}05$) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap dampak ekonomi bank sampah. Sementara itu, variabel indeks kelengkapan regulasi ($\beta_2 = 0{,}156$, $p > 0{,}05$) tidak signifikan secara statistik.

Temuan tidak signifikannya kelengkapan regulasi adalah temuan yang krusial dan secara teoritis penting: kehadiran regulasi formal tanpa implementasi yang konsisten dan kapasitas yang memadai tidak cukup untuk mendorong dampak ekonomi yang optimal. Ini memperkuat proposisi Moore (1995) tentang pentingnya kapasitas operasional sebagai komponen ketiga dari strategic triangle keberadaan kebijakan formal (legitimizing environment) tidak mencukupi tanpa operational capacity yang memadai. Campos (2019) mendapatkan kesimpulan yang serupa dari konteks Brasil.

Analisis Tema Kualitatif: Faktor Penghambat dan Pendorong

Tabel 9. Hasil Analisis Tematik: Tema dan Temuan Penelitian

Tema Utama	Sub-Tema	Temuan Lapangan	Implikasi Kebijakan
Akses Modal	Keterbatasan permodalan	Modal bergantung pada iuran anggota dan hibah sporadis	Hambatan utama keberlanjutan
Kapasitas SDM	Kompetensi manajerial rendah	70% pengelola belum pernah mengikuti pelatihan akuntansi dasar	Perlu pelatihan terstruktur
Regulasi & Insentif	Inkonsistensi fiskal	Tidak ada mekanisme insentif pajak bagi mitra pengepul	Gap regulasi signifikan
Pasar & Offtaker	Ketergantungan pengepul	70%+ bank sampah bergantung pada satu pengepul utama	Risiko rantai nilai tinggi
Monitoring & Evaluasi	Lemahnya sistem data	Tidak ada sistem pelaporan terintegrasi DLH–bank sampah	Gap tata kelola informasi

Sumber: Hasil wawancara mendalam dan FGD, 2024

Tema akses modal muncul sebagai hambatan utama yang paling konsisten dalam seluruh sesi wawancara (12/12 informan pengelola bank sampah menyebutkannya sebagai kendala utama). Ketergantungan pada hibah pemerintah yang bersifat sporadis menciptakan siklus dependensi yang menghambat pembentukan kemandirian finansial. Informan BS-3 (Pengelola BS Sejahtera, 2024) menyatakan: 'Kami pernah punya program yang bagus tapi berhenti karena hibah dari DLH tidak turun di tahun berikutnya. Tidak ada kepastian.'

Tema kapasitas SDM juga sangat menonjol. Dari 87 responden survei, 69,3% menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengikuti pelatihan akuntansi atau manajemen keuangan. Kondisi ini menyebabkan mayoritas bank sampah mengelola keuangannya secara informal tanpa laporan keuangan yang terstandar, sehingga menyulitkan proses monitoring dan evaluasi dari pihak DLH. Temuan ini konsisten dengan Wardhani et al. (2021) yang mengidentifikasi lemahnya kapasitas SDM sebagai hambatan sistemis tata kelola bank sampah di Indonesia.

Perbandingan dengan Praktik Terbaik Kota Lain

Untuk memposisikan temuan penelitian ini dalam konteks yang lebih luas, peneliti melakukan analisis komparatif dengan praktik tata kelola bank sampah di dua kota pembanding yang dikenal memiliki pengelolaan relatif baik: Surabaya dan Makassar.

Tabel 10. Perbandingan Kebijakan Keuangan Publik Bank Sampah: Bandar Lampung vs Surabaya vs Makassar

Dimensi Kebijakan	Bandar Lampung	Surabaya	Makassar
Regulasi Insentif Fiskal	Tidak ada insentif berbasis kinerja	Ada skema reward berbasis volume sampah	Ada insentif pajak bagi mitra pengepul
Proporsi Anggaran Operasional	32% dari total anggaran	58% dari total anggaran	61% dari total anggaran
Sistem Monitoring	Manual, output-based	Digital, outcome-based	Semi-digital, outcome-based
Integrasi dengan RPJMD	Parsial	Penuh (target RPJMD 2021–2026)	Penuh (termasuk target inklusi ekonomi)
Pelatihan SDM Pengelola	1x/tahun	4x/tahun + pendampingan	3x/tahun + akses KUR
Tingkat Kemandirian Finansial	<20% mandiri	45% mandiri	38% mandiri

Sumber: DLH Bandar Lampung (2023); Santosa et al. (2022); diolah peneliti

Tabel 10 menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung masih tertinggal secara signifikan dalam aspek desain insentif fiskal, proporsi anggaran operasional, sistem monitoring, dan frekuensi pelatihan SDM dibandingkan dengan Surabaya dan Makassar. Yang paling mencolok adalah perbedaan proporsi anggaran operasional: Bandar Lampung hanya mengalokasikan 32% untuk operasional langsung, sementara Surabaya (58%) dan Makassar (61%) mengalokasikan mayoritas anggarannya untuk dampak langsung.

Kondisi ini tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah yang berbeda: Bandar Lampung sebagai secondary city memiliki APBD yang lebih kecil dan tekanan belanja yang lebih besar dari sektor lain. Namun demikian, Santosa et al. (2022) berargumen bahwa efektivitas program bank sampah lebih ditentukan oleh desain kebijakan (policy design) daripada semata-mata besaran anggaran implikasi bahwa redesain struktur anggaran program bank sampah Bandar Lampung masih sangat mungkin dilakukan dalam keterbatasan fiskal yang ada.

Implikasi Teoritis

Dari sisi teoritis, penelitian ini memberikan beberapa kontribusi penting. Pertama, penelitian ini memperlihatkan bahwa Public Value Framework Moore (1995) dapat dioperasionalisasikan secara efektif dalam konteks evaluasi kebijakan keuangan publik persampahan perkotaan di Indonesia. Adaptasi kerangka ini menghasilkan konstruk 'Public Value Score' yang mengintegrasikan dimensi anggaran, regulasi, kapasitas SDM, dan dampak ekonomi dalam satu indeks terukur.

Kedua, temuan tentang tidak signifikannya kelengkapan regulasi ($\beta_2 = 0{,}156$, $p > 0{,}05$) memberikan konfirmasi empiris atas proposisi teoritis Pressman dan Wildavsky (1984) bahwa kelengkapan regulasi tanpa implementasi yang konsisten tidak akan menghasilkan perubahan kebijakan yang nyata. Ini adalah kontribusi empiris penting dari konteks negara berkembang yang sering kali memiliki kondisi 'regulation-rich, implementation-poor'.

Ketiga, penelitian ini mendemonstrasikan bagaimana mixed methods sequential explanatory dapat digunakan secara efektif dalam penelitian keuangan publik daerah untuk mengungkap mekanisme di balik pola statistik yang ditemukan. Kombinasi analisis regresi berganda dengan analisis tematik menghasilkan pemahaman yang jauh lebih kaya dibandingkan pendekatan monomethod (Creswell & Plano Clark, 2018).

KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab empat tujuan utama yang ditetapkan dan menghasilkan tiga kesimpulan substantif. Pertama, terdapat kesenjangan kebijakan keuangan publik yang bersifat struktural pada program bank sampah Kota Bandar Lampung, yang paling kritis pada aspek: (a) ketiadaan mekanisme insentif fiskal berbasis kinerja dalam Perda pengelolaan sampah; (b) proporsi anggaran yang tidak proporsional (68% administrasi vs 32% operasional); (c) lemahnya koordinasi lintas dinas; dan (d) tidak adanya sistem monitoring berbasis outcome ekonomi. Kesenjangan ini bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan mencerminkan ketiadaan kerangka public value yang koheren dalam desain kebijakan bank sampah Kota Bandar Lampung.

Kedua, rata-rata efektivitas realisasi anggaran program bank sampah selama 2019–2023 mencapai 85,1% (cukup efektif berdasarkan standar Mahkamah Agung, 2016), namun terdapat paradoks: tingginya penyerapan anggaran tidak sebanding dengan kualitas belanja yang masih didominasi komponen administrasi. Analisis regresi berganda mengkonfirmasi bahwa alokasi anggaran ($\beta = 0{,}412$), kapasitas SDM ($\beta = 0{,}298$), dan frekuensi monitoring ($\beta = 0{,}387$) merupakan prediktor signifikan dampak ekonomi bank sampah, sementara kelengkapan regulasi formal tidak signifikan secara statistik.

Ketiga, bank sampah memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan: nilai ekonomi sampah terkelola tumbuh 108% (2019–2023) mencapai Rp 79,4 miliar/tahun, penghematan biaya persampahan kota mencapai Rp 4,8 miliar/tahun, dan penyerapan tenaga kerja meningkat 102% menjadi 634 orang pada 2023, mayoritas dari kelompok perempuan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Temuan ini mengkonfirmasi potensi bank sampah sebagai instrumen kebijakan inklusi ekonomi yang efektif, namun potensi ini baru dapat dioptimalkan dengan dukungan kebijakan keuangan publik yang koheren.

REFERENCES

Alford, J. (2009). *Engaging Public Sector Clients: From Service-Delivery to Co-Production*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230235816

Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank Sampah sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, *23*(1), 136–141.

Audit Commission. (2000). *Getting the Best from Waste: The Performance of Waste Management Services*. Audit Commission Publications.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung. (2023). *Data Anggaran dan Realisasi Program Bank Sampah Kota Bandar Lampung Tahun 2023*.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public Value Governance: Moving Beyond Traditional Public Administration and the New Public Management. *Public Administration Review*, *74*(4), 445–456. https://doi.org/10.1111/puar.12238

Campos, H. K. T. (2019). Income Generation and Waste Management in Brazil. *Waste Management*, *85*, 98–107. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.12.002

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). SAGE Publications.

Damanhuri, E., & Padmi, T. (2016). *Pengelolaan Sampah Terpadu* (2nd ed.). Penerbit ITB.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. (2023). *Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2023*.

Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315181226

Farhan, A., Firdaus, M., & Hadi, S. (2021). Efektivitas Program Bank Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kota Bogor. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, *21*(2), 115–132. https://doi.org/10.21002/jepi.v21i2.1305

Heidegger, A., & Kalkuhl, M. (2022). Fiscal Instruments for Waste Reduction: Evidence from Germany. *Environmental and Resource Economics*, *82*(1), 45–73. https://doi.org/10.1007/s10640-021-00621-8

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022*.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Laporan Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional 2023*.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Standar Penilaian Efektivitas Realisasi Anggaran*.
Moore, M. H. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Harvard University Press.
Mulasari, S. A., Husodo, A. H., & Muhadjir, N. (2022). Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta dan Kebijakan Penanggulangannya. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, *16*(3), 91–99. https://doi.org/10.21109/kesmas.v16i3.5419
Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. McGraw-Hill.
Nurdiani, N., Adriati, I., & Santoso, W. (2022). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Bank Sampah terhadap Masyarakat Sekitar: Studi Kasus di Depok. *Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, *38*(2), 214–228. https://doi.org/10.29313/mimbar.v38i2.8875
O'Toole, L. J. (2000). Research on Policy Implementation: Assessment and Prospects. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *10*(2), 263–288. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024270
Osborne, S. P. (2006). The New Public Governance? *Public Management Review*, *8*(3), 377–387. https://doi.org/10.1080/14719030600853022
Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation* (3rd ed.). University of California Press.
Putri, A. R., & Yulianti, D. (2023). Keberlanjutan Bank Sampah Berbasis Kelembagaan Lokal: Pembelajaran dari Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *11*(1), 1–18. https://doi.org/10.31289/jiap.v11i1.8145
Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*.
Rotich, H., Zhao, Y., & Dong, J. (2018). Municipal Solid Waste Management Challenges in Developing Countries: Kenyan Case Study. *Waste Management*, *26*(1), 92–100. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2005.03.007
Santosa, I., Rachman, A., & Kuncoro, M. (2022). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Bank Sampah di Kota-Kota Indonesia Menggunakan Pendekatan Keuangan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, *13*(2), 87–104. https://doi.org/10.31258/jkp.v13i2.7432
Suwerda, B. (2020). *Bank Sampah: Kajian Teori dan Implementasi*. Gosyen Publishing.
Tchobanoglous, G., Theisen, H., & Vigil, S. A. (1993). *Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues*. McGraw-Hill.
Wardhani, R. K., Hakim, A., & Saleh, C. (2021). Analisis Tata Kelola Bank Sampah di Indonesia: Perspektif New Public Management. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *9*(1), 34–52. https://doi.org/10.31289/jiap.v9i1.5214
Widyarsana, I. M. W., Murachman, B., & Darundiati, Y. H. (2018). Potensi Daur Ulang dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Coblong Kota Bandung. *Jurnal Teknik Lingkungan*, *10*(1), 9–22. https://doi.org/10.5614/jtl.2018.10.1.02
Wilson, D. C., Rodic, L., Modak, P., Soos, R., Carpintero, A., Velis, K., Iyer, M., & Simonett, O. (2019). *Global Waste Management Outlook*. https://doi.org/10.18356/765baec3-en
Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Sage.
Yusuf, A., Febrianti, N., & Syaukat, Y. (2022). Peran Bank Sampah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga di Perkotaan: Bukti dari Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *20*(1), 45–62. https://doi.org/10.29259/jep.v20i1.14523